

THE EFFECTIVENESS OF THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE IMPLEMENTATION PROCEDURES IN NORTH SULAWESI PROVINCE REGIONAL INSPECTORATE

**MEYCHAEL WILIAM LASIRO
ARIE JUNUS RORONG
DEYSIL.TAMPONGANGOY**

The purpose of the research is to find out the effectiveness of the procedure for the implementation of the supervisory function in the Insperktorat area of North Sulawesi province. This research uses qualitative approach method. Research Informant was the person the Inspector, 2 person head of Sub-Division, 2 person Irban Region 5 Office/Bureau of Associated, in total as many as 10 informants. Data collection using the guidelines of the interview, while the analysis techniques used are interactive model analysis from Miles and Hubernan. Based on the results of the data analysis is drawn the conclusion: (1) organizational Productivity or output in this case regarding the work of the regional Inspectorates North Sulawesi province in the exercise of supervisory functions in eithercase showed where the work given that ability is in compliance with the employees of the Inspectorate and owned the purpose of supervision. So as a result it works or output is also satisfying for the Bureau/Office/field as an objects of supervision. (2) the effectiveness of the Organization in the form of his success adapting to changes inside and outside the Organization has been very good. This is evident from the adaptability of the inspector's staff with work and organization environments that is very good as well as in carryng out the supervision procedures in accordance with the tupoksi and existing standard operating procedures. (3) the absence of tension within the organization or obstacles to conflict among parts of the organization. In this case it can be seen that the relationship between the imployee of the inspektorat and his superiors as well as colleagues/co-works is well established as well as the attitudes and relationships shown to the agency/bureau/field of supervision of the inspekto's staff.

Keywords: Effectiveness , Implementation, Supervision

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan daerah, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi masyarakat terutama dari aparat yang akan melaksanakan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif adalah merupakan kebutuhan yang sangat medesak khususnya pada masa reformasi sekarang ini. Arah pendekatannya yaitu difokuskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya penyampaian kebijakan pemerintah pusat dan sekaligus sebagai pelaksana program pemerintahan.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan dari masyarakat, akan adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan dari masyarakat disebabkan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat pemerintah umumnya dan aparat pemerintah daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat pemerintah daerah, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh pemerintah daerah itu sendiri.

Kewenangan yang luas tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang *leader* dalam setiap organisasi, seiring dengan fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan. Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, maka tugas dan tanggung jawab dilimpahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power*. Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah, sehingga masyarakat bertanya di mana dan ke mana arah lembaga tersebut, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah antipatik melihat perilaku birokrasi dalam menjalankan fungsi dalam pemerintahan.

Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintahan No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri

No. 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dipertegas oleh Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Adam Indrawijaya(2002:214) mengatakan bahwa efektivitas organisasi pada dasarnya adalah efektivitas perseorangan atau dengan kata lain bila setiap anggota organisasi dengan melakukan tugas dan pekerjaan masing-masing dengan baik, efektivitas organisasi secara keseluruhan akan timbul. Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

Konsep Prosedur Pelaksanaan

Menurut Mulyadi (2001:6) karakteristik prosedur diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan-pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan-urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukkan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.
5. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Dengan demikian karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukkan urutanurutan yang logis serta menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pakem yang berlaku.

Menurut Winardi (2000, hal. 585) Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mendefinisikan bahwa Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda menurut Enjelin Bondi (2018) dalam penelitiannya yang menggunakan teori dari Siagian (2000) menyebutkan adanya delapan sifat/ciri pengawasan yang efektif, yaitu:

1. Bersifat "*fact finding*", artinya bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan
2. Bersifat preventif, artinya bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan dari rencana yang telah ditentukan
3. Diarahkan pada masa sekarang, artinya bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dijalankan.
4. Hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika

ada ketidak beresan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.

8. Harus bersifat pembimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang telah ditentukan.

Konsep Inspektorat

Berdasarkan amanat pasal 218 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pasal 11 PP No.20. Tahun 2001 tentang pembinaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka unsur pengawasan pada pemerintahan daerah di laksanakan oleh inspektur wilayah provinsi/kabupaten atau kota. Inspektur merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang di pimpin oleh seorang kepala badan atau kepala lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah,serta usaha daerah lainnya.selain itu inspektorat mempunyai tugas dan fungsi.

Inspektorat provinsi mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.sedangkan inspektorat kabupaten kota mempunyai kedudukan tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten kota masing-masing yang di

atur dan di tetapkan melalui dengan perda masing-masing kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2006) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams (Moleong, 2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus (Moleong, 2006).

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab pendahuluan di muka bahwa yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Efektivitas Prosedur Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu digunakanlah indikator-indikator penilaian berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) antara lain:

Produktivitas organisasi atau output

Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi

Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Jenis data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

Informan	1 orang
Inspektur	2 orang
Kepala Sub Bagian	2 orang
Urban Wilayah	5 orang
Dinas Terkait	5 orang
Jumlah	10 orang

Atas dasar pendapat di atas maka dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, dan dilengkapi dengan teknik observasi dan teknik dokumentasi.

1. Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan obyek/fokus yang diteliti, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
3. Studi dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara yang

berkaitan dengan obyek/fokus penelitian, seperti : data kepegawaian, data penyelenggaraan pelayanan pulik, dan lainnya.

Hasil Penelitian

1. Produktivitas organisasi atau output dalam hal ini mengenai hasil kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan melihat kesesuaian tugas dan pekerjaan yang diberikan dengan kemampuan para pegawai inspektorat, sudah terlihat sesuai dengan bidang dan kemampuan para pegawai. Adanya pembagian tupoksi serta penetapan SOP sesuai peraturan yang ada juga menjadi pedoman yang membuat para pegawai lebih mudah menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan dari pengawasan yang telah direncanakan bersamam. Tingkat efisiensi dan ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas pengawasan juga menunjukkan hal positif dimana disiplin waktu penyelesaian tugas dan penanganan masalah terkait pengawasan yang dilakukan,. setiap pekerjaan diselesaikan tepat pada waktu sesuai dengan penugasan dibidang/wilayah masing-masing dengan memperhatikan kebutuhan dan konteks pemeriksaan walaupun biasanya ada keterlambatan karena faktor eksternal namun tidak mengganggu program dan kegiatan yang telah disusun. Semua itu karena dalam menjalankan fungsi pengawasan inspektorat menggunakan metode pengawasan langsung

dengan pengambilan sampling, cek fisik, dan wawancara ke objek yang diperiksa (SKPD atau Kab/Kota). Terbukti dari beberapa dinas/biro/bidang tempat inspektorat menjalankan tugas pengawasannya menilai kinerja inspektorat sudah sangat baik dalam melaksanakan tugasnya sesuai mekanisme, SOP dan tupoksi.

2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi. Dilihat dari kemampuan adaptasi para pegawai inspektorat dengan lingkungan kerja dan organisasi sejauh ini sangat baik karena setiap pegawai inspektorat senantiasa menempatkan diri sebagai seorang abdi Negara yang taat serta memberikan semuan yang terbaik untuk pekerjaan sesuai SOP dan tupoksi yang sudah ada sehingga tidak adanya permasalahan dalam menyelesaikan masalah pekerjaan serta dalam hubungan kerja antara sesama juga terjalin dengan baik. Tak hanya dengan lingkungan organisasi, adaptasi yang baik juga diperlihatkan para pegawai inspektorat dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diberikan. Keinginan belajar dan bekerja keras untuk memahami pekerjaan yang diberikan serta melatih diri untuk menjadi lebih baik dengan bertanya jika ada tugas yang kurang dipahami membuat pelaksanaan pengawasan dan tugas-tugas yang dijalankan semakin efektif. Hal ini juga didorong dengan prosedur pelaksanaan pengawasan yang dijalankan oleh inspektorat yang selalu mengacu pada tupoksi dan sop yang sudah

ditetapkan di masing-masing bidang/wilayah berdasarkan aturan pemerintah.

3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. Dalam hal ini dapat dilihat hubungan kerja antara pegawai inspektorat dengan atasannya juga rekan/teman kerja terjalin dengan baik begitu pula sikap dan hubungan yang ditunjukkan kepada dinas/biro/bidang tempat mengawasi para pegawai inspektorat. Hubungan baik ini terbangun atas dasar profesionalitas yang mengacu pada aturan dan sistem kerja berdasarkan tupoksi.

PENUTUP

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas prosedur pelaksanaan fungsi pengawasan di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produktivitas organisasi atau output dalam hal ini mengenai hasil kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dalam sudah menunjukkan hal baik dimana pekerjaan yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki para pegawai inspektorat dan tujuan pengawasan. Sehingga output atau hasilnya kerjanya juga memuaskan bagi para biro/dinas/bidang sebagai objek pengawasan
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan

perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi sudah sangat baik. Hal ini terbukti dari kemampuan adaptasi para pegawai inspektorat dengan lingkungan kerja dan organisasi sangat luar biasa baik begitupula dalam melaksanakan prosedur pengawasannya sesuai tupoksi dan standar operasional prosedur yang ada

3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi. Dalam hal ini dapat dilihat hubungan kerja antara pegawai inspektorat dengan atasannya juga rekan/teman kerja terjalin dengan baik begitu pula sikap dan hubungan yang ditunjukkan kepada dinas/biro/bidang tempat mengawas para pegawai inspektorat.

Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terkait produktivitas organisasi atau output dalam hal ini mengenai hasil kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan fungsi pengawasan walaupun sudah baik namun harus diadakan evaluasi agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah lagi konsistensi terhadap etos kerja dan integritas harus terus dijaga.
2. Untuk efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar

organisasi mungkin lebih terbuka perihal perubahan zaman agar tercipta inovasi-inovasi yang membantu meningkatkan efektivitas kerja seperti metode komputerisasi dan penggunaan sistem online

3. Untuk menjaga tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi komunikasi harus tetap dijaga begitu pun interaksi harus berjalan intens. Keterbukaan antara pegawai, dan jajaran tim kerja maupun biro/dinas terkait sangat dibutuhkan

DAFTAR PUSTAKA

- Adam I., Indrawijaya. 2002. *Perilaku Organisasi Sinar Baru*. Bandung : Algasindo.
- Adisasmita, R. 2014. *Jaringan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Azhar, La Midjan Dan Susanto. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi I Dan II*. Edisi Ke Sebelas. Bandung : Lembaga Informasi
- Brantas, 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, B.M.H. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Kurniawan. A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Maman Ukas. 2004. *Manajemen Konsep, Prinsip Dan Aplikasi*. Cetakan Ketiga. Bandung : Agnini.
- Manullang. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 2002 . *Qualitative Data Analysis*. Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Redoskarya.

- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reksohadiprodjo., S., Gitosudarmo., I. 2008. *Manajemen Produksi*. Yogyakarta: Bpfe Yogyakarta
- Rivani, M., Panjaitan, F. R., Hasibuan, H. A., Siahaan, D., Herawan, T. 2009. *Optimasi Penjumlahan Karoten Sawit Dengan Teknik Solvolitik Misellisasi Menggunakan Etanol*. Journal Penelitian Kelapa Sawit.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang., P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Binapura Aksara.
- Siswandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Siswandi. I., Iman. 2009. *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Edisi Kedua. Jakarta: Mitra Wicana Media.
- Sumaryadi, I. Nyoman. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Tangkilisan. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Terry, George Dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winardi. 2001. *Motivasi Dan Pemotivasian Dalam Manajemen*. Cetakan Pertama. Jakarta : Pt.Raja Grafindo Persada.
- Yayat M. Herujito. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: P.T. Grasindo
- Sumber Lain :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara
- Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara